



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih ini merupakan rancangan kegiatan utama dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih (2013-2018).

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, kondisi geografis, demografis, ekonomi, pemerintahan, kondisi pendidikan Kota Prabumulih dan potensi yang ada yang sangat mendukung Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang disaring melalui analisis kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan hambatan yang dikenal dengan istilah analisis SWOT.

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik yang menyangkut masalah pelaksanaan pendidikan di Kota Prabumulih selama kurun waktu lima tahun (2013-2018).

Atas jasa bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih ini, kami ucapkan terima kasih.

Prabumulih, Februari 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PRABUMULIH**

H. M. Rasyid, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2Maksud dan Tujuan.....	2
1.3Landasan Hukum.....	3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya.....	11
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Permasalahan Pendidikan.....	13
3.2 Isu Strategis.....	14
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
4.1. Visi Pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	17
4.2 Misi Pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.....	17
4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	18
BAB V	RENCANA, PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
5.1. Program Operasional Organisasi.....	24
5.2. Kegiatan	24
5.3. Indikator Kinerja	27
5.4. Pendanaan Indikatif	30
BAB VI	PENUTUP
6.1 Kesimpulan.....	32
6.2 Saran	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lingkungan strategis nasional maupun internasional yang dihadapi dewasa ini dan di masa mendatang, mengisyaratkan perubahan paradigma pemerintahan, pembaharuan sistem kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta hubungan antar bangsa yang mengarah pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance)

Fenomena perubahan mendasar yang dimanifestasikan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan pembangunan sumber daya manusia, dan ketersediaan sumber daya lainnya. Dalam hal penyesuaian struktur organisasi pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2007 yang menghendaki adanya penyempurnaan guna efisiensi dan efektifnya kinerja aparat pelaksana birokrasi.

Seiring dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan restrukturisasi terhadap organisasi termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, sehingga perlu adanya tindak lanjut secara nyata berupa penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk lima tahun dengan mempedomani Visi dan Misi Kota Prabumulih serta Strategi Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang didalamnya memuat bidang pendidikan. Rencana adalah proses awal dari suatu kegiatan yang harus dilakukan secara benar, teliti serta memperhatikan aspek efektif dan efisiensi yang tinggi sehingga nantinya akan dapat menghasilkan suatu yang berkualitas.

Sebagai salah satu proses dalam rangka menopang suatu keputusan, perencanaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi segala keterbatasan yang dimiliki oleh suatu lembaga organisasi atau institusi. Sebagai salah satu proses dalam rangka menopang suatu keputusan, perencanaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi segala keterbatasan yang dimiliki oleh suatu lembaga organisasi atau institusi. Mengingat sektor pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, maka perencanaan yang terpadu, terintegrasi, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada sehingga menghasilkan suatu rencana strategis dalam jangka menengah lima tahunan yang berkualitas sesuai kebutuhan. Betapapun baiknya suatu perencanaan namun apabila tidak didukung oleh pendanaan dan peran serta masyarakat, maka tidak akan dapat terlaksana dan tidak akan

mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diamanatkan pada Bab XIII Pasal 46 ayat 1 dan 2 perihal pendanaan pendidikan disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan dijelaskan secara rinci dalam bab XV Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 yaitu dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan dan penggunaan hasil pendidikan. Pada akhirnya masalah pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih tahun 2013-2018 adalah sebagai arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, UPTD Pendidikan Kota Prabumulih dan Rencana Kerja di Tingkat Sekolah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih tahun 2013-2018 berfungsi untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pendidikan Kota Prabumulih
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Prabumulih terhadap pendidikan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pendidikan Kota Prabumulih yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Menjaga kesinambungan perkembangan pendidikan Kota Prabumulih yang dilaksanakan secara tahunan

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan program Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih. Sebuah komitmen yang dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus antar “stakeholders” untuk menentukan arah pembangunan pendidikan Kota Prabumulih dimasa akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJMD Kota Prabumulih.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- c. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- d. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025)
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013)
- t. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 07 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumulih Selatan;
- u. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Prabumulih tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- v. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun Nomor);

- w. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 03 tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 03);
- x. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.
- y. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018.

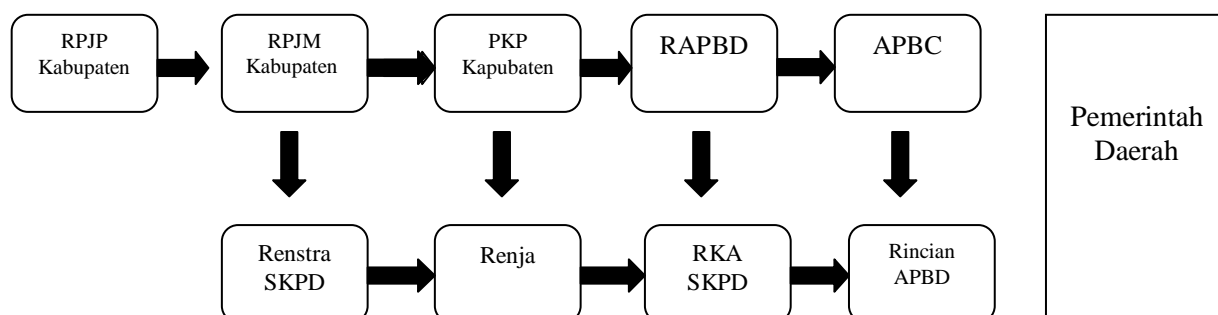
1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal sebagai berikut:

1. RKPD Kota Prabumulih merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun dengan tujuan Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Kota Prabumulih dan bersifat indikatif.
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Strategis (2013-2018) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih juga menjadi bahan acuan sekolah-sekolah dalam membuat Rencana Menengah dan Rencana Jangka Panjang Sekolah yang akan ada di Kota Prabumulih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Program dan Kegiatan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah. Program dan Kegiatan Renstra SKPD dan RKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA SKPD) dan di anggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) menjadi Rancangan APBD dan disahkan dalam APBD Kota. APBD Kota setelah disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Kota untuk dibuat dan dituangkan dalam DPA.

Bagan Alur keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 ini meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan Pendidikan
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- 4.1. Visi pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- 4.2. Misi Pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1. Program Operasional Organisasi
- 5.1. Kegiatan
- 5.3. Indikator Kinerja
- 5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI. PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktus Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai berikut :

2.1.1. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan di Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Prabumulih sebagai Kepala Daerah.

2.1.2. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Kota Prabumulih di Bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu meliputi pelayanan pendidikan kepada masyarakat baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, menyusun rencana, mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan kebudayaan, sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan program pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, serta pengelolaan kebudayaan.
- c. Menetapkan rencana dan program kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyusun dan menetapkan pembagian tugas : Sekretaris, Kepala Bidang, , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD-Pendidikan, sebagai Sasaran Kinerja yang akan dicapai.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- f. Merumuskan dan menetapkan Norma, standar, prosedur, dan kriteria Tata kelola Satuan Pendidikan, serta program pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan serta pengelola kebudayaan di lingkungan Dinas pendidikan dan kebudayaan.
- g. Melaksanakan program peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan, pengelola kebudayaan serta pegawai di lingkungan Dinas pendidikan dan kebudayaan.
- h. Menetapkan fasilitasi program peningkatan mutu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar serta pengelolaan kebudayaan.
- i. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah, dan layanan pengadaan barang/jasa.
- j. Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder serta menjalin peran serta masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar serta pengelolaan kebudayaan.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pada bidang : pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. .
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, dan menetapkan hasil pencapaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (pertanggungjawaban) hasil pelaksanaan tugas.
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota.

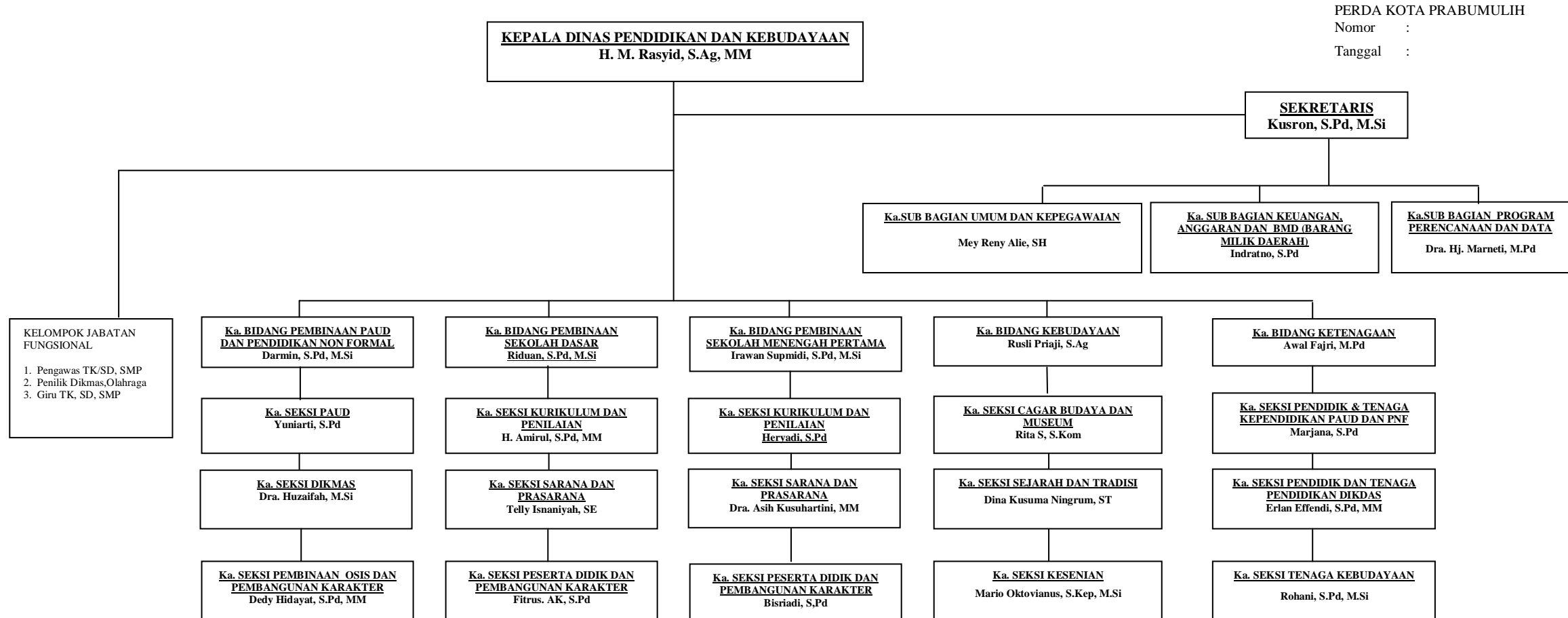
2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih adalah terdiri dari (terlampir) :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - A. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - B. Sub Bagian Keuangan, Anggaran Dan BMD
 - C. Sub Bagian Program Perencanaan Dan Data
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - A. Seksi Paud
 - B. Seksi Dikmas
 - C. Seksi Pembinaan Osis Dan Pembangunan Karakter

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - A. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - B. Seksi Sarana Dan Prasarana
 - C. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - A. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - B. Seksi Sarana Dan Prasarana
 - C. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
6. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - A. Seksi Cagar Budaya Dan Museum
 - B. Seksi Sejarah Dan Tradisi
 - C. Seksi Kesenian
7. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 - A. Seksi Pendidik & Tenaga Kependidikan Paud Dan PNF
 - B. Seksi Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Dikdas
 - C. Seksi Tenaga Kebudayaan

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PRABUMULIH**



KET :
_____ Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Prabumulih, Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Prabumulih

Dito

2.2. Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih memiliki sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya berupa asset/barang inventaris. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.1 Keadaan Data Pegawai

Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Kota Prabumulih pada tahun 2017 berjumlah 69 orang, terdiri dari 69 orang PNS, 0 orang CPNS dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2017 Berdasarkan Pangkat dan Golongan (Februari 2017)

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1
2	Pembina Tingkat I / IV.b	7
3	Pembina / IV.a	10
4	Penata Tingkat I / III.d	6
5	Penata / III.c	11
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	11
7	Penata Muda / III.a	9
8	Pengatur Tingkat I / II.d	5
9	Pengatur / II.c	4
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	3
11	Pengatur Muda / II.a	2
	JUMLAH	69

Tabel 2. Peta Jabatan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2017

No	Nama Jabatan	Ess	Keadaan Tahun 2017		
			Kebutuhan	Sudah terisi	Kurang
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	II-a	1	1	0
2	Sekretaris	III-a	1	1	0
3	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	III-b	1	1	0
4	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	III-b	1	1	0
5	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	III-b	1	1	0
6	Kabid Kebudayaan	III-b	1	1	0
7	Kabid Ketenagaan	III-b	1	1	0
8	Subbag Umum Dan Kepegawaian	IV-a	1	1	0
9	Subbag Keuangan, Anggaran Dan BMD	IV-a	1	1	0
10	Subbag Program Perencanaan Dan Data	IV-a	1	1	0
11	Kasi Paud	IV-a	1	1	0

12	Kasi Dikmas	IV-a	1	1	0
13	Kasi Pembinaan Osis Dan Pembangunan Karakter	IV-a	1	1	0
14	Kasi Kurikulum Dan Penilaian Bid. Pembinaan SD	IV-a	1	1	0
15	Kasi Sarana Dan Prasarana Bid. Pembinaan SD	IV-a	1	1	0
16	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bid. Pembinaan SD	IV-a	1	1	0
17	Kasi Kurikulum Dan Penilaian Bid. Pembinaan SMP	IV-a	1	1	0
18	Kasi Sarana Dan Prasarana Bid. Pembinaan SMP	IV-a	1	1	0
19	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bid. Pembinaan SMP	IV-a	1	1	0
20	Kasi Cagar Budaya Dan Museum	IV-a	1	1	0
21	Kasi Sejarah Dan Tradisi	IV-a	1	1	0
22	Kasi Kesenian	IV-a	1	1	0
23	Kasi Pendidik & Tenaga Kependidikan Paud Dan PNF	IV-a	1	1	0
24	Kasi Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Dikdas	IV-a	1	1	0
25	Kasi Tenaga Kebudayaan	IV-a	1	1	0
Jumlah :		25	25		0

2.2.2 Data Sumber Daya Lainnya/Sarana dan Prasarana (Aset / Barang Inventaris)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset /barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memadukan Kondisi Umum Daerah, Kondisi Umum Pendidikan dan juga Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Prabumulih dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan bidang pendidikan dan isu-isu strategis pembangunan pendidikan Kota Prabumulih periode 5 (Lima) tahun kedepan (2013-2018). Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dibidang pendidikan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategis dan arah kebijakan pembangunan. Salahsatu modal sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal yang dimiliki oleh suatu entitas organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2013-2018).

3.1 Permasalahan Pendidikan

Masyarakat, dunia usaha dan pemerintah merupakan pelaku utama yang berpotensi untuk mempercepat pembangunan pendidikan Kota Prabumulih. Namun untuk mencapai kondisi yang diinginkan 5 (Lima) tahun mendatang kenyataannya masih banyak terdapat permasalahan pendidikan yang sedang dan akan dihadapi yang bersifat strategis. Permasalahan-permasalahan ini mempengaruhi kehidupan dan perkembangan pendidikan di Kota Prabumulih baik secara statis dan atau dinamis perlu mendapat perbaikan dan diantisipasi terencana dan sistematis.

Dari sekian banyak permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah.
2. Biaya pendidikan yang masih dirasakan cukup tinggi bagi sebagian masyarakat.
3. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
4. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.
5. Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai.
6. Pelayanan pendidikan yang belum optimal.
7. Kualitas lembaga pendidikan swasta yang masih rendah.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dibidang pendidikan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah / masyarakat dimasa mendatang. Isu strategis perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi pembangunan kedepan. Selain itu antisipasi dan atau pengelolaan isu strategis juga dimaksudkan sabagai upaya untuk dapat memberdayakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal di masa mendatang demi peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam analisis isu strategis pendidikan Kota Prabumulih, aspek penting yang menjadi dasar proses penentuannya ialah dengan menentukan kriteria umumnya. Kriteria isu strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi yang bersifat penting dan mendasar.
2. Bersifat mendesak.
3. Luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
4. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran peningkatan kualitas pendidikan.
5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
6. Bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

3.2.1. Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Kondisi ketertiban dan keamanan di Kota Prabumulih yang kondusif.
2. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, terutama dunia usaha dibidang pendidikan.
3. Dedikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang tinggi.
4. Jumlah peserta didik yang banyak.
5. Memiliki daya dukung wilayah yang baik.
6. Minat yang tinggi dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan diri.

B. Kelemahan

1. Proporsi APBD belum optimal
2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang-undangan relatif rendah.
3. Minimnya sarana pendidikan berbasis teknologi informatika, kewirausahaan, dan olahraga.
4. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
5. Masih rendahnya tingkat kualifikasi guru khususnya pada tingkat PAUD/TK/RA/SD/MI.
6. Belum meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Kurang pendidik dan tenaga kependidikan disetiap jenjang pendidikan.

3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan.
2. Tingginya tuntutan pelayanan publik.
3. Globalisasi informasi dan ekonomi.
4. Peluang kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Perkembangan IPTEK.
6. Kebijakan otonomi daerah.
7. Kebijakan otonomi daerah.
8. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kab/Kota dalam hal pendidikan.
9. Berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen.

B. Ancaman

1. Global Warming.
2. Krisis Multidimensional
3. Ego Daerah.
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah.
5. Masih adanya pemukiman yang jauh dari sekolah.
6. Sekolah swasta cenderung menjadi prioritas kedua.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dunia pendidikan.
8. Maejemen politik birokrasi.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan hasil analisis dengan memperhatikan kebijakan nasional, regional, dan lokal yang telah ada, penetapan kriteria isu strategis dan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dapat dirangkum 5 (lima) isu strategis pembangunan dibidang pendidikan Kota Prabumulih yaitu :

1. Partisipasi / daya serap sekolah.
2. Akses dan kualitas lembaga pendidikan.
3. Sumber daya manusia pelaku pendidikan.
4. Infrastruktur dasar pendidikan.
5. Tatakelola pendidikan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih memerlukan satu filosofi pembangunan dibidang pendidikan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman dan arah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan menentukan Visi dan Misi serta arah pembangunan pendidikan.

Sebagai Kota yang baru terbentuk, tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih masih memerlukan banyak penyusunan, penataan dan pembangunan di bidang pendidikan. Berpedoman pada yang telah digariskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita seluruh bangsa dan Negara Indonesia.

Visi Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS”

Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kata Kota Prabumulih adalah batas wilayah kerja pemerintah Kota Prabumulih dengan segala potensi yang terkandung didalamnya.
2. Kata PRIMA mengandung dua pengertian, yaitu :
 - a. PRIMA merupakan singkatan dari : Prestasi/produktif, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman.
 - b. PRIMA mengandung pengertian terbaik disegala sektor/urusan pemerintah dan pembangunan Kota Prabumulih untuk mencapai masyarakat Kota Prabumulih yang adil, sejahtera dan bermartabat.
3. Kata Berkualitas, adalah : kondisi masyarakat yang berada pada cakupan untuk keperluan hidupnya berupa kecukupan pangan, sandang, rumah, kebutuhan jasmani dan rohani yang lebih berkualitas atau bermutu baik.

Untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas, Walikota Prabumulih dan Wakil Walikota Prabumulih telah merumuskan 4 (empat) misi utamanya yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata pemerintahan yang baik, demokrasi, inovasi, enterpreneurship, berprestasi, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Kota Prabumulih yang madani (produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika, berbudaya dan berwawasan lingkungan).

3. Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Prabumulih yang handal dan merata melalui perdagangan dan jasa.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

4.1 Visi Pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih

Dinamika perubahan berbagai bidang kehidupan global, nasional dan regional merupakan tantangan bagi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dalam konteks pembangunan dibidang pendidikan. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mendorong laju pertumbuhan pendidikan yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Laju pertumbuhan tersebut selanjutnya dapat dilihat dari semakin berkurangnya buta aksara, meningkatkan APK dan APM, optimalnya pelayanan pendidikan masyarakat dan partisipasi masyarakat, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan filosofi, prinsip dan dinamika kontekstual tersebut, maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KESETARAAN PENDIDIKAN YANG PRIMA DAN BERKUALITAS”

KESETARAAN : Tidak adanya perbedaan pelayanan pendidikan antar wilayah, suku, agama, status sosial, negeri, swasta, serta gender.

PRIMA : Prestasi, Religious, Inovatif, Mandiri, Aman (terbaik di setiap jenjang pendidikan).

BERKUALITAS : Unggul dibidang keterampilan, IPTEK dan IMTAQ.

4.2 Misi Pembangunan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan. Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, serta infrastruktur penunjang pendidikan lainnya baik di sekolah negeri maupun swasta.
2. Mewujudkan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas, daya saing dan relevansi lulusan pendidikan yang berstandar nasional.
4. Mewujudkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
5. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM pendidik dan Tenaga Kependidikan baik di sekolah negeri maupun swasta.

4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Strategi pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Visi dan Misi. Disamping itu strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan pendidikan dilakukan dengan menganalisa isu-isu yang berkembang secara sistematis dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk tahun 2018, yaitu seperti tertera pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
A.	MISI PERTAMA : Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, serta infrastruktur penunjang pendidikan lainnya, baik sekolah negeri maupun disekolah swasta			
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung sekolah	Tersedianya ruang kelas tempat belajar yang baik	Peningkatan kualitas ruang kelas tempat belajar sesuai standar	Melaksanakan rehab Ruang Kelas tempat belajar
		Tersedianya ruang bermain bagi siswa PAUD dan TK	Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang bermain sesuai standar	Melaksanakan rehab dan pembangunan ruang bermain
		Tersedianya ruang perpustakaan, laboratorium, bengkel dan ruang praktik lainnya	Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang penunjang pembelajaran lainnya sesuai standar	Melaksanakan rehab dan pembangunan ruang penunjang pembelajaran lainnya
		Tersedianya ruang kepala sekolah, guru dan tata usaha	Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang kantor sekolah sesuai standar	Melaksanakan rehab dan pembangunan ruang kantor sekolah
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran dan ekstrakurikuler	Tersedianya alat praktik dan peraga yang memadai dan berbasis teknologi dan informatika	Peningkatan penyediaan alat praktik dan peraga berbasis teknologi dan informatika	Melaksanakan pengadaan alat praktik dan peraga berbasis teknologi dan informatika
		Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler
		Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana olahraga
		Terjadinya buku-buku pelajaran, buku penunjang, buku referensi dan buku-buku perpustakaan	Peningkatan penyediaan buku-buku pelajaran, buku penunjang, buku referensi dan buku-buku perpustakaan	Melaksanakan pengadaan buku-buku pelajaran, buku penunjang, buku referensi dan buku-buku perpustakaan
		Tersedianya sarana dan prasarana bermain bagi siswa PAUD dan TK	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bermain bagi siswa PAUD dan TK	Melaksanakan pengadaan alat bermain bagi siswa PAUD dan TK
		Meningkatkan status akreditasi sekolah	Peningkatan status akreditasi sekolah ke nilai B dan A	Memfasilitasi kesiapan sekolah dalam peningkatan status akreditasi sekolah
3	Mewujudkan program 5K	Meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah	Peningkatan wawasan kebersihan lingkungan/kesehatan dan pengetahuan	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan tentang kebersihan

			pengolahan sampah	lingkungan hidup dan kesehatan dan pengolahan sampah.
		Tersedianya taman dan penghijauan sekolah	Pencapaian ruang terbuka hijau disekolah	Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan
		Meningkatnya ketertiban di sekolah	Peningkatan penyediaan dan pemahaman tata tertib sekolah yang dibuat dan disetujui bersama	Menerapkan sanksi secara konsisten bagi siswa yang melanggar tata tertip sekolah
		Meningkatkan keamanan di sekolah	Peningkatan penyediaan sarana dan tenaga keamanan lingkungan sekolah	Melaksanakan pengadaan sarana dan tenaga keamanan sekolah
		Terwujudnya rasa kekeluargaan di sekolah	Menciptakan sistem yang mendukung kegiatan yang dapat mempererat rasa kekeluargaan	Memfasilitasi kegiatan kekeluargaan baik disekolah maupun dengan anatar sekolah
B	MISI KEDUA : Mewujudkan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat baik disekolah negeri maupun di sekolah swasta			
1	Menurunkan angka putus sekolah dan menaikkan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	Tersedianya beasiswa miskin baik siswa yang orang tuanya kurang mampu	Penurunan angka putus sekolah disetiap jenjang pendidikan	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan beasiswa miskin
		Tersedianya beasiswa prestasi bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan perguruan tinggi	Peningkatan angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan beasiswa prestasi
		Terselenggaranya program paket A, B, dan C	Peningkatan kualifikasi tentang kerja	Melaksanakan program paket A, B dan C
		Terselenggara program sekolah gratis	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	Melaksanakan program sekolah gratis dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat
2	Memperdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan keikutsertaan komite sekolah dan yayasan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pendidikan disekolah	Pelaksanaan program dan kegiatan sekolah yang partisipatif	Terlaksananya upaya peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam upaya penanganan masalah pendidikan

		Terlaksananya program pendidikan di sekolah yang efektif dan efisien	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana belajar yang tepat guna dan multi guna	Terlaksananya program pendidikan disekolah dengan fasilitas yang memadai
		Terselenggaranya kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dunia usaha dalam pelaksanaan program pendidikan	Peningkatan dan pengembangan potensi pendidikan	Terlaksananya program pendidikan disekolah dengan fasilitas yang memadai
		Meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap program pendidikan	Peningkatan sistem informasi pendidikan	Meningkatkan kualitas sistem pengolahan data dan informasi pendidikan
C	MISI KETIGA : Mewujudkan peningkatan kualitas, daya saing dan relevansi pendidikan yang berstandar nasional			
1	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik	Meningkatnya kualitas dan mutu lulusan pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi pendidikan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan
		Terselenggaranya lomba prestasi akademik dan non akademik	Peningkatan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan lomba prestasi	Penyusunan rencana lomba prestasi yang tepat waktu dalam setiap jenjang pelaksanaan
		Terselenggaranya program peningkatan mutu disekolah	Peningkatan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan program peningkatan mutu di sekolah	Penyusunan rencana program peningkatan mutu di sekolah yang tepat waktu dalam pelaksanaan dan tepat sasaran
		Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah	Peningkatan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah	Penyusunan rencana program dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa
2	Meningkatkan kreatifitas, keterampilan, moral dan etika siswa	Terselenggaranya kerjasama dengan dunia usaha, swasta dan dinas instansi dalam program praktek kerja lapangan	Peningkatan koordinasi terpadu dengan pihak dunia usaha, swasta dan dinas instansi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan	Penyusunan rencana program kegiatan praktek kerja lapangan sesuai relevansi dan kebutuhan dunia usaha
		Terselenggaranya kegiatan dan lomba kreatifitas bagi siswa	Peningkatan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan kegiatan lomba kreativitas siswa	Penyusunan rencana lomba kreativitas yang tepat waktu dalam setiap jenjang pelaksanaan
		Tersedianya waktu praktek diluar	Peningkatan waktu jam praktek dan	Pelaksanaan workshop dan pelatihan

		jam belajar di sekolah	peningkatan jumlah tenaga instruktur yang berkualitas	instruktur kegiatan praktek
		Meningkatnya nilai-nilai karakter bangsa pada peserta didik	Memfasilitasi kegiatan bimbingan konseling, kegiatan wawasan nusantara dan kegiatan-kegiatan keagamaan	Peningkatan upaya pembinaan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter bangsa
D	MISI KEEMPAT : Mewujudkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi			
1	Meningkatnya daya tampung dan daya serap sekolah disetiap jenjang pendidikan baik disekolah negeri maupun swasta	Terwujudnya penambahan ruang kelas baru	Membangun ruang kelas baru	Bertambahnya ruang kelas baru disetiap sekolah dan setiap jenjang pendidikan di sekolah yang membutuhkan
		Terwujudnya penambahan unit sekolah baru	Membangun unit sekolah baru	Bertambahnya unit sekolah baru disetiap jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan
E	MISI KELIMA : Mewujudkan peningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dan masyarakat	Terwujudnya organisasi pendidikan di sekolah yang adil, efektif dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi fungsi kelembagaan	Penataan organisasi baik ditingkat sekolah maupun ditingkat dinas instansi
		Terlaksannya standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pengelolaan pendidikan	Peningkatan pelaksanaan SOP dan SPM	Tercapainya target penilaian kinerja
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang jujur, bersih, berwibawa, dan tanggungjawab	Membangun transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan monitoring evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pembinaan pelaksanaan kegiatan
		Terselenggaranya manajemen berbasis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah	Pelimpahan wewenang pelaksanaan pendidikan kesekolah	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya dan potensi sekolah
2	Meningkatkan kemampuan, keterampilan	Meningkatnya kualifikasi akademik	Mengfasilitasi dan memotivasi	Terlaksananya upaya peningkatan

	dan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan	peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan	mutu/kualitas akademik yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
		Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan sertifikasi guru	Peningkatan kompetensi dan keprofesionalan tenaga pendidik
		Terselenggaranya workshop dan pelatihan fungsional bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas workshop dan pelatihan fungsional pendidikan dan tenaga kependidikan	Peningkatan potensi dan tertib administrasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pengembangan diri
3	Meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya program tunjangan fungsional, profesi, sertifikat dan tunjangan lainnya bagi pendidik dan tenaga pendidikan	Peningkatan koordinasi terpadu dalam penyelenggaraan program tujuan fungsional, profesi, sertifikasi dan tunjangan lainnya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
		Terselenggaranya program pemberian penghargaan melalui kenaikan pangkat dan jabatan sesuai capaian kinerja, kemampuan, prestasi dan disiplin kerja	Meningkatkan pengawasan kedisiplinan	Peningkatan motivasi kerja melalui penerapan reward and punishment

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Pendidikan, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.

5.1 Program Operasional Organisasi

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7. Program Pembinaan Menengah pertama
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga kependidikan
9. Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
10. Program Pengelolaan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.2 Kegiatan

Dari program yang telah ditetapkan maka selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja atau kegiatan di masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Sekretariat :

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- 13 Penyediaan Jasa Media Informasi
- 14 Administrasi Pengelolaan Tamsil Guru
- 15 Administrasi Pengelolaan Sertifikasi Guru
- 16 Sistem Penilaian Kinerja Untuk PAK Jabatan
- 17 Penyediaan Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pengajar
- 18 Administrasi Pengelolaan BOS dan Beasiswa
- 19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 20 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
- 21 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 22 Penyusunan Dokumen RKA APBD Induk
- 23 Penyusunan LAKIP
- 24 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Perubahan SKPD
- 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 26 Penyusunan LPPD
- 27 Kegiatan Uji Kompetensi Guru (UKG)
- 28 Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan
- 29 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD
- 30 Penyusunan Laporan Realisasi Standar Pelayanan Minimal
- 31 Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas)
- 32 Sosialisasi perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pegawai
- 33 Pembinaan disiplin dan penataan kinerja pegawai

b. Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal:

- 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 2 Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PAUD dan PNFI
- 3 Seleksi OOSN SD
- 4 Seleksi OOSN SMP
- 5 Kegiatan Paskibraka
- 6 Wawasan Kebangsaan
- 7 Seleksi FLS2N SD
- 8 Seleksi FLS2N SMP
- 9 UN Paket A, B, C
- 10 Penyebaran informasi pendidikan melalui Pameran dan Pawai Kendaraan Hias
- 11 Pekan Olahraga Pelajar Daerah
- 12 Pengadaan Raport PAUD dan TK
- 13 Lomba Hari Anak Nasional (HAN)
- 14 Apresiasi mutu pendidikan dalam rangka Hardiknas
- 15 Apresiasi jambore PAUD Dikmas

c. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:

- 1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP
- 2 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
(SMP)
- 3 Kegiatan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
- 5 Olimpiade Sains Nasional (SMP)
- 6 Pengadaan Buku Raport SMP
- 7 Pelaksanaan Pemilihan siswa SMP Berprestasi
- 8 Lomba Cepat Tepat Mapel (PAI) SMP
- 9 Pelatihan Proktor dan teknisi Pengawas UNBK
- 10 Pembangunan Pagar SMPN 6
- 11 Pembangunan Kantor Konstruksi Bertingkat

d. Pembinaan Sekolah Dasar

- 1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Sekolah Dasar
- 2 Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam
- 3 Sosialisasi Program Indonesia Pintar
- 4 Kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
- 5 Seleksi Siswa SD Berprestasi
- 6 Pengadaan Buku Raport Kelas 1 (satu)
- 7 olimpiade sains siswa SD
- 8 Pembangunan pagar SDN 17
- 9 Pembangunan ruang guru

e. Ketenagaan:

- 1 Pendidikan Sekolah Gratis TK
- 2 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Sekolah Dasar
- 3 Olimpiade Sains Guru MIPA
- 4 Operasional Program Sekolah Gratis (PSG)
- 5 Sekolah Gratis APBD Kota
Administrasi Tenaga Kependidikan Kualifikasi S1/D4 dan Insentif Guru
non PNS
- 7 Peningkatan Mutu Tenaga Seni Musik

f. Kebudayaan:

- 1 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
- 2 pendataan cagar budaya kota prabumulih
- 3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- 4 Pagelaran Kesenian Daerah dan Nasional
- 5 Pembangunan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

5.3. Indikator Kinerja

Dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk indikator kinerja di masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Sekretariat :

- 1 Tersedianya jasa surat menyurat
- 2 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas
- 4 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
- 5 Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 6 Tersedianya ATK
- 7 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- 8 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
- 9 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10 Tersedianya makanan dan minuman
- 11 Tersedianya rakor dan konsultasi ke luar Daerah
- 12 Tersedianya Rakor dalam daerah
- 13 Tersedianya jasa media informasi
- 14 Terlaksananya administrasi tamsi guru
- 15 Terlaksananya pengelolaan sertifikasi guru
- 16 Terlaksananya workshop Sistem Penilaian Kerja untuk PAK
- 17 Terlaksananya Penyediaan dana Bantuan mutu PTK
- 18 Administrasi Pengelolaan BOS dan Beasiswa
- 19 Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran
- 20 Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD
- 21 Terlaksananya SOP
- 22 Terlaksananya Penyusunan Dokumen
- 23 Terlaksananya Penyusunan LAKIP
- 24 Terlaksananya DPA Perubahan
- 25 Terlaksananya Monev, Evaluasi dan Pelaporan
- 26 Terlaksananya penyusunan LPPD
- 27 Terlaksananya Kegiatan Uji Kompetensi Guru (UKG)
- 28 Terlaksananya penyusunan profil dinas pendidikan
- 29 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja
- 30 Terlaksananya SPM
- 31 Terlaksananya Sosialisasi Dapodikdas
- 32 Terlaksananya Analisis jabatan dan analisis beban kerja
- 33 Terlaksananya Pembinaan disiplin dan penataan kinerja pegawai

b. Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal

- 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 2 Workshop Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PAUD dan PNFI
- 3 Terlaksananya Seleksi O2SN Tingkat kota, Prov
- 4 terlaksananya O2SN SMP tingkat kota, Prov,
- 5 Kegiatan Paskibraka
- 6 Terlaksananya Wawasan kebangsaan
- 7 Terlaksananya FL2SN SD tingkat kota, Prov,
- 8 terlaksananya FLS2N tingkat kota, Prov,
- 9 Terlaksannaya UN Paket A,B, C
- 10 Terlaksananya Pawai kendaraan hias
- 11 Terlaksananya POPDA
- 12 Tersedianya Raport PAUD
- 13 Terlaksananya Lomba HAN
- 14 terlaksananya peringatan hardinas
- 15 apresiasi jambore PAUD Dikmas

c. Pembinaan SMP

- 1 Terlaksannanya pelatihan kurikulum dan penilaian
- 2 terlaksannaya pemberian Beasiswa prestasi keluarga kurang mampu (S1/S2)
- 3 Terlaksananya pendataan dan pengelolaan KIP dan PIP
- 4 Terlaksannanya Kegiatan USBN/UNBK
- 5 Terlaksananya OSN SMP
- 6 Terlaksananya pengadaan buku raport SMP
- 7 Terlaksananya Pemilihan siswa berprestasi
- 8 Lomba Cepat Tepat Mapel PAI
- 9 Pelatihan Proktor dan teknisi Pengawas UNBK

- 10 Pembangunan Pagar SMPN 6
- 11 Pembangunan Kantor Konstruksi Bertingkat

d. Pembinaan SD

- 1 Terlaksananya Pelatihan kurikulum 2013
- 2 Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam
- 3 Terlaksananya sosialisasi PIP
- 4 Terlaksannanya kegiatan US SD
- 5 Terlaksananya Seleksi siswa SD berprestasi
- 6 Tersedianya raport SD bagi siswa kelas 1
- 7 terlaksananya olimpiade sains siswa SD
- 8 Pembangunan pagar SDN 17
- 9 Pembangunan ruang guru

e. Ketenagaan

- 1 Terlaksananya pendidikan sekolah gratis TK
- 2 Terlaksananya seleksi PTK Tingkat SD
- 3 Terlaksananya Olimpiade Guru MIPA
- 4 Terlaksananya Operasional PSG
- 5 Terlaksannanya Sekolah Gratis APBD Kota
- 6 Telaksananya administrasi Tenaga Kependidikan kualifikasi S1 dan non PNS
- 7 workshop Seni tari, drama

f. Kebudayaan

- 1 terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
- 2 pendataan cagar budaya kota prabumulih
- 3 Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- 4 Terlaksannaya Kesenian daerah dan nasional
- 5 Terlaksannaya Kesenian daerah dan nasional

5.4. Pendanaan Indikatif

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dari pelaksanaan, kegiatan dan indikator kinerja guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang (Rencana Program dan Kegiatan) pada Tabel 4 sebagai berikut:

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih dengan mempedomani Visi, Misi Kota Pemerintah Kota Prabumulih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Prabumulih telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan kerja untuk jangka waktu lima tahun (2013-2018)

Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, serta acuan pelaksanaan program dan rencana kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk lima tahun (2013-2018).

6.2. SARAN

Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih menyadari adanya kelemahan dan kekurangan atas program yang kami susun ini mengingat waktu yang tersedia sangat singkat.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih tahun 2013-2018 ini hendaknya menjadi pedoman dan acuan adalah menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Rencana Kerja di Tingkat Sekolah.